

Pendampingan Penguatan Tata Kelola dan Administrasi Keuangan pada BUMDes Raharja Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung

Assistance in Strengthening Governance and Financial Administration at BUMDes Raharja, Punjul Village, Karangrejo District, Tulungagung

Rika Rizki Rohmah^{1*}, Zainul Asror², Purwanto³, Laela Nikmatul Wafiroh⁴

¹⁻⁴ STAI Darul Hikmah Tulungagung, Indonesia

Email: rika@staidhtulungagung.ac.id¹, zainulasror827@gmail.com², purwanto@staidhtulungagung.ac.id³, laelanikmatulwafiroh@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: rika@staidhtulungagung.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 15 Oktober 2025;

Revisi: 12 November 2025;

Diterima: 10 Desember 2025;

Tersedia: 19 Desember 2025

Keywords: Accountability; Community Assistance; Financial Administration; Governance Bumdes; Transparency

Abstract: BUMDes Raharja, as a village-owned economic institution, plays a strategic role in supporting local economic growth. However, preliminary assessments indicate several weaknesses in organizational governance and financial administration, particularly concerning record-keeping discipline, understanding of village financial management standards, and utilization of supporting operational documents. This community assistance research aims to strengthen institutional governance and enhance financial administrative capacity within BUMDes Raharja to ensure greater transparency, accountability, and compliance with village financial management principles. The study employs a participatory action research (PAR) approach through three main stages: (1) situation analysis and problem mapping, (2) implementation of assistance through training, technical support, and development of financial administrative instruments, and (3) evaluation through observation, document analysis, and interviews. The results show improved understanding among BUMDes administrators regarding financial administration procedures, the development of more systematic financial recording formats, and strengthened commitment to implementing more orderly and professional governance. Overall, the assistance program has had a positive impact on enhancing the managerial capacity of BUMDes Raharja as a sustainable village economic institution.

Abstrak

BUMDes Raharja sebagai lembaga ekonomi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, hasil identifikasi awal menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam tata kelola organisasi serta administrasi keuangan, terutama terkait ketertiban pencatatan, pemahaman standar pengelolaan keuangan desa, dan pemanfaatan dokumen pendukung operasional. Penelitian pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kapasitas administrasi keuangan BUMDes Raharja agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan adalah *participatory action research* (PAR) melalui tiga tahapan utama: (1) analisis situasi dan pemetaan permasalahan, (2) pelaksanaan pendampingan berupa pelatihan, asistensi teknis, dan penyusunan instrumen administrasi keuangan, serta (3) evaluasi hasil pendampingan melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus BUMDes terhadap alur administrasi keuangan, tersusunnya format pencatatan keuangan yang lebih sistematis, serta terbangunnya komitmen untuk menerapkan tata kelola kelembagaan yang lebih tertib dan profesional. Pendampingan ini secara keseluruhan memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas manajerial BUMDes Raharja sebagai lembaga ekonomi desa yang berorientasi pada keberlanjutan.

Kata Kunci: Administrasi Keuangan; Akuntabilitas; Pendampingan; Tata Kelola Bumdes; Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berbasis desa menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen penting dalam menggerakkan potensi ekonomi desa melalui tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel. BUMDes Raharja Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang memiliki peran signifikan dalam mendukung peningkatan pendapatan asli desa (PADes) serta pemberdayaan masyarakat. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa. Kehadiran BUMDes Raharja Desa Punjul menjadi bukti komitmen pemerintah desa untuk mengelola potensi sumber daya lokal demi kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, BUMDes sering menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dan administrasi keuangan. (Widiastuti et al., 2023)

Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Namun demikian, dinamika operasional di lapangan menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan administrasi keuangan masih menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi agar BUMDes mampu berfungsi secara optimal sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Situasi awal menunjukkan bahwa BUMDes Raharja mengelola beberapa unit usaha yang meliputi unit usaha ketahanan pangan, unit usaha hippam, unit usaha Gapoktan, unit usaha pariwisata. Permasalahan utama yang muncul di lapangan adalah lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. Banyak kegiatan usaha BUMDes yang berjalan tanpa mekanisme administrasi keuangan yang tertib dan baku. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam memantau arus kas, mengukur kinerja keuangan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat maupun pemerintah desa.

Permasalahan ini berdampak pada kurang optimalnya manajemen usaha, pelaporan keuangan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat desa. Maka dari itu, isu utama dalam kegiatan pendampingan ini adalah memperkuat sistem tata kelola dan administrasi keuangan

BUMDes agar berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip *good governance*. Selain itu, dokumentasi administrasi seperti bukti transaksi, format laporan, dan arus kas belum mengikuti standar pembukuan baku yang dianjurkan oleh Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendataan dan Pengelolaan BUMDes. (Sidik, 2022) Proses pencatatan masih dilakukan secara manual tanpa template standar, menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan triwulan serta kesulitan dalam melakukan audit internal. Kondisi ini diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola BUMDes belum memiliki kompetensi memadai dalam penyusunan laporan keuangan sederhana seperti jurnal umum, neraca saldo, atau laporan laba rugi.

Berdasarkan isu-isu di atas, kegiatan pendampingan ini difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan administrasi keuangan melalui langkah langkah praktis dan aplikatif. Fokus utama pendampingan mencakup empat aspek yaitu penguatan Kapasitas SDM Pengurus BUMDes. Dengan memberikan pelatihan dasar mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sistem pembukuan sederhana, dan manajemen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktik langsung dengan studi kasus laporan keuangan BUMDes, Penyusunan dan Penerapan Format Administrasi Keuangan Standar. Menyusun panduan administrasi keuangan yang mencakup alur pencatatan transaksi, format buku kas, laporan keuangan bulanan, serta mekanisme pengarsipan dokumen. Panduan ini dibuat sederhana agar mudah dipahami dan diterapkan secara mandiri oleh pengurus, Pendampingan Implementasi Sistem Keuangan Digital Sederhana. Mengajarkan penggunaan aplikasi *spreadsheet* (seperti *Microsoft Excel* atau *Google Sheet*) untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan. (Firmansyah amriefirmansyah & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023)

Dengan sistem ini, data keuangan dapat dihitung otomatis dan lebih cepat disusun menjadi laporan bulanan, Pembentukan Mekanisme Evaluasi dan Pengawasan Internal. Mendorong BUMDes memiliki struktur pengawasan internal yang aktif, baik dari pengurus maupun pemerintah desa. Tim pengawas diharapkan mampu memantau arus kas, memeriksa dokumen transaksi, dan memberikan masukan terhadap laporan keuangan. Kegiatan pendampingan ini bukan sekadar pelatihan administrasi, tetapi merupakan bagian dari proses pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi dan aset yang mereka miliki secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks BUMDes Raharja, penguatan tata kelola dan administrasi keuangan merupakan fondasi penting agar lembaga ini mampu mengelola dana desa secara profesional. Ketika administrasi dan keuangan berjalan baik, maka kepercayaan masyarakat meningkat, partisipasi

dalam kegiatan ekonomi desa pun tumbuh, dan akhirnya kesejahteraan bersama dapat terwujud.(Tarlani et al., 2023)

Potensi BUMDes Raharja untuk berkembang sangat besar. Dukungan Pemerintah Desa Punjul cukup kuat, baik dari sisi kebijakan maupun alokasi modal usaha. Selain itu, masyarakat desa juga memiliki partisipasi yang cukup baik dalam kegiatan ekonomi desa. Beberapa unit usaha yang dijalankan BUMDes sudah menunjukkan hasil positif, seperti peningkatan omset dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Kondisi inilah yang menjadi modal sosial penting untuk memperkuat kelembagaan BUMDes ke arah yang lebih profesional.

Fokus pemberdayaan pada kegiatan ini, bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan ekonomi desa dengan cara penguatan kapasitas SDM pengurus, pendampingan penyusunan menggunakan format administrasi keuangan standar. (Nurfitriasih et al., 2025)Maka dari itu, pendampingan ini dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, yaitu dengan melibatkan langsung pengurus BUMDes dalam setiap tahapan kegiatan agar mereka memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengelola administrasi dan laporan keuangan secara professional dan berdaya saing.

2. METODE

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan melalui partisipatif edukatif, yakni dengan menjadikan pengurus BUMDes sebagai subjek aktif yang terlibat dalam setiap kegiatan. Pendampingan tidak hanya berupa penyuluhan, melainkan juga pelatihan, praktik langsung, dan evaluasi Bersama. Metode yang dilakukan yaitu dengan metode penerapan praktik langsung pencatatan laporan keuangan secara tepat serta memberikan solusi aplikatif sesuai kebutuhan. Edukasi ini diarahkan BUMDesa mampu mengalokasikan laporan keuangan bulanan dengan sistis pencatatan yang terperinci. Selain itu, mengoptimalkan tenaga kerja secara efisien, menginovasi layanan BUMDes yang disediakan baik dengan cara offline maupun onlaine, serta menyusun laporan laba rugi yang transparan dan akuntabel.

Langkah-Langkah pendampingan ditata secara sistematis agar proses transfer pengetahuan berjalan secara optimal. Tahap awal dilakukan dengan tahap persiapan dengan survei dan identifikasi permasalahan awal BUMDes, kemudian melakukan pelatihan teknis dan administrasi, simulasi pencatatan keuangan, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, subjek dampingan dipilih secara purposif, yaitu pengurus inti BUMDes Raharja dan beberapa staf administrasi desa yang terlibat dalam proses keuangan. Hal ini dimaksudkan agar agar hasil pendampingan memiliki keberlanjutan dan dapat diimplementasikan secara

konsisten.

3. HASIL

Kondisi awal BUMDes Raharja

Kondisi awal BUMDes Raharja menunjukkan bahwa struktur kelembagaan dan pola tata kelola sudah benar. Namun, beberapa perangkat organisasi seperti pembagian tugas, alur koordinasi, dan standar operasional prosedur (SOP) belum terdokumentasi secara sistematis. Akibatnya, pelaksanaan program usaha cenderung bergantung pada inisiatif individu dan tidak memiliki rujukan baku, sehingga rentan menimbulkan ketidakteraturan dalam pengambilan keputusan dan pelaporan kegiatan. Situasi ini memperlihatkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan agar BUMDes mampu beroperasi lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Dari aspek administrasi keuangan, BUMDes Raharja masih menghadapi sejumlah kendala seperti pencatatan transaksi yang bersifat manual, masih minimnya penggunaan format laporan keuangan standar akuntansi. Ketidadaan sistem pembukuan berbasis aplikasi atau format digital membuat proses pengarsipan, monitoring, serta evaluasi keuangan menjadi kurang efektif. Hal ini berdampak pada kurangnya kejelasan arus kas dan kesulitan bagi pengelola maupun pemerintah desa dalam menilai kinerja unit usaha secara objektif. Kondisi ini menjadi dasar pentingnya pendampingan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial di bidang administrasi keuangan.

Tata Kelola administrasi masih di perlukan tahap pembenahan dikarenakan Minimnya pelatihan, supervisi, dan evaluasi rutin membuat proses pengembangan usaha kurang terarah. Melalui program pendampingan, diharapkan BUMDes Raharja tidak hanya mampu membenahi tata kelola dan administrasi keuangannya, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan yang berkelanjutan sehingga dapat bertransformasi menjadi lembaga ekonomi desa yang berdaya saing dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. (Arens, 2018)

Pelaksana Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan BUMDes Raharja dilakukan melalui serangkaian kegiatan terstruktur yang mencakup observasi awal, identifikasi kebutuhan, pelatihan teknis, serta pendampingan langsung pada proses administrasi dan pengelolaan kelembagaan. Tim pendamping memberikan bimbingan terkait penyusunan SOP, pembagian tugas pengurus, serta perbaikan alur koordinasi organisasi agar tata kelola berjalan lebih efektif. Pada bidang keuangan, pendampingan difokuskan pada penerapan sistem pencatatan transaksi yang baku, penggunaan format laporan keuangan standar, serta simulasi penyusunan laporan bulanan dan tahunan. Pendamping juga memberikan asistensi penggunaan aplikasi atau format digital

sederhana untuk pembukuan agar proses pengarsipan lebih rapi dan mudah diaudit. Melalui kombinasi pelatihan, praktik langsung, dan monitoring berkala, pendampingan ini membantu BUMDes Raharja memperbaiki manajemen internal dan membangun dasar tata kelola serta administrasi keuangan yang lebih profesional dan akuntabel.

Kendala dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi BUMDes Raharja dalam konteks Pendampingan Penguatan Tata Kelola dan Administrasi Keuangan pada umumnya berkaitan Minimnya dokumentasi SOP menyebabkan alur kerja tidak seragam, sementara kurangnya disiplin pencatatan transaksi membuat laporan keuangan sering terlambat dan tidak akurat. Selain itu, fasilitas pendukung seperti perangkat digital, aplikasi pembukuan, dan arsip administrasi belum dimanfaatkan secara optimal. (Nurfitriasih et al., 2025)

Dalam aspek kelembagaan, pengurus BUMDes Raharja sebenarnya memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk memajukan lembaga ini. Mereka memiliki kesadaran bahwa BUMDes adalah aset bersama masyarakat Desa Punjul yang harus dikelola dengan baik. Namun, keterbatasan pengalaman dan minimnya bimbingan teknis membuat semangat tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh kemampuan teknis yang memadai.

Selain itu, sistem pelaporan keuangan belum mengacu pada pedoman akuntansi BUMDes yang disarankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). (Kunci et al., 2024) Format laporan yang digunakan masih bersifat sederhana, mencakup hanya catatan kas masuk dan kas keluar tanpa laporan laba rugi maupun neraca posisi keuangan. Padahal, laporan keuangan yang komprehensif sangat penting untuk menilai kinerja keuangan BUMDes secara menyeluruh.

Harapan yang diinginkan melalui dampingan

Adapun harapan yang diinginkan dalam pendampingan ini yaitu BUMDes Raharja memiliki sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang tertib dan transparan, Pengurus BUMDes mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri dengan format yang mudah dipahami, (Trivena et al., 2023) Masyarakat Desa memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pengelolaan dana BUMDes. Dan terwujudnya model tata kelola BUMDes sederhana namun profesional, yang dapat dijadikan contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Tulungagung.

Hasil Dampingan

Hasil pendampingan BUMDes Raharja menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan meningkatnya kerapian dan konsistensi administrasi kelembagaan maupun keuangan. Pengurus kini telah memiliki SOP dasar yang mengatur alur kerja, pembagian tugas, dan

mekanisme pelaporan sehingga tata kelola berjalan lebih terstruktur dan transparan. Dalam aspek keuangan, sistem pencatatan sudah mulai menggunakan format standar dan terdokumentasi secara rapi, termasuk laporan transaksi harian, rekap bulanan, serta penyusunan laporan keuangan sederhana. Pengelola juga menjadi lebih mampu mengoperasikan format digital pembukuan serta memahami konsep dasar arus kas, sehingga proses monitoring usaha dapat dilakukan dengan lebih akurat. Secara keseluruhan, pendampingan ini membantu memperkuat fondasi tata kelola BUMDes Raharja menuju lembaga yang lebih akuntabel, adaptif, dan siap berkembang.



Gambar 1. Dokumentasi Pendampingan.



Gambar 2. Dokumentasi Pendampingan.

4. DISKUSI

Pendampingan penguatan tata kelola dan administrasi keuangan pada BUMDes Raharja Desa Punjul dapat dikaji secara keilmuan melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup bidang manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi, dan tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan implementasi dari konsep *good governance* di tingkat desa, (Trivena et al., 2023) di mana prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan

efektivitas dijadikan landasan dalam setiap proses pengelolaan organisasi, termasuk dalam lembaga ekonomi desa seperti BUMDes. Oleh karena itu, diskusi keilmuan terhadap kegiatan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, kelembagaan, dan moralitas publik.

Secara teoretis, penguatan tata kelola keuangan BUMDes dapat dikaitkan dengan teori Good Corporate Governance (GCG) yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan lembaga ekonomi. Dalam konteks BUMDes, prinsip-prinsip GCG diterjemahkan dalam bentuk pelaporan keuangan yang transparan, penggunaan dana yang sesuai peruntukan, serta adanya sistem evaluasi dan pengawasan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. BUMDes yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan mampu menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kredibilitas lembaga, dan memperkuat keberlanjutan usaha desa. (Samosir et al., 2023)

Dari perspektif manajemen, kegiatan pendampingan ini juga mencerminkan penerapan teori Capacity Building atau pengembangan kapasitas kelembagaan. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan kinerja organisasi tidak hanya bergantung pada modal finansial, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia, sistem administrasi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Dalam konteks BUMDes Raharja, pendampingan yang dilakukan berfokus pada peningkatan kemampuan pengurus dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan secara profesional. Melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan simulasi laporan keuangan, pengurus didorong untuk memahami konsep akuntansi dasar dan pentingnya administrasi yang tertib. (Ayu et al., 2020)

Selain itu, secara ekonomi, pendampingan BUMDes juga dapat dijelaskan melalui konsep pembangunan ekonomi berbasis komunitas (community-based development). (Ayu et al., 2020) Teori ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus berangkat dari kekuatan masyarakat lokal. BUMDes adalah bentuk konkret dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang mengandalkan partisipasi warga sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat. Dengan tata kelola yang baik, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas ekonomi antarwarga desa. Pendampingan keuangan yang dilakukan pada BUMDes Raharja menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa lembaga ini mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional dan berkelanjutan.

Dari sisi akuntansi, kegiatan ini erat kaitannya dengan teori akuntabilitas publik (public accountability). Akuntabilitas publik menuntut agar setiap lembaga yang mengelola dana masyarakat harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana tersebut secara

terbuka dan sistematis. Dalam kasus BUMDes Raharja, keterbatasan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan sebelumnya menyebabkan kurangnya akuntabilitas. Melalui pendampingan ini, pengurus dilatih untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi dasar, termasuk laporan arus kas, laporan laba rugi, dan neraca sederhana. Dengan demikian, BUMDes dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pendampingan ini juga relevan dengan teori *governance* desa yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, lembaga ekonomi desa, dan masyarakat. Dalam praktiknya, tata kelola BUMDes tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan pemerintah desa sebagai pembina dan masyarakat sebagai pemilik modal sosial. Kegiatan pendampingan memberikan ruang diskusi bagi ketiga unsur tersebut untuk berinteraksi, mengidentifikasi masalah, serta menyusun langkah-langkah perbaikan bersama. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis BUMDes, tetapi juga memperkuat hubungan kelembagaan antar aktor desa. (Ayu et al., 2020)

Dari sudut pandang pendidikan masyarakat (*community education*), pendampingan ini juga menjadi sarana pembelajaran sosial. Melalui kegiatan pelatihan dan praktik langsung, masyarakat dan pengurus BUMDes mendapatkan pengalaman nyata tentang pentingnya tata kelola keuangan yang tertib dan transparan. Proses belajar ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik di mana peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menerapkan dan membiasakan perilaku administrasi yang baik dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi terhadap pembentukan budaya organisasi yang profesional dan bertanggung jawab. (Hartono et al., 2025)

Pendampingan BUMDes merupakan instrumen strategis dalam kebijakan pembangunan desa yang bertujuan memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2021). Regulasi terkait BUMDes menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi pengelolaan usaha desa yang berkelanjutan (Sutiyo & Maharjan, 2020).

Dalam konteks kebijakan publik, pendampingan desa berfungsi sebagai mekanisme implementatif untuk menjembatani norma hukum dengan praktik sosial di tingkat lokal, sehingga kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif semata (Agustino, 2022). Selain itu, pengelolaan keuangan desa berbasis nilai-nilai ekonomi syariah dinilai mampu memperkuat integritas pengelola serta mendorong keadilan distributif dalam pemanfaatan dana publik (Huda et al., 2021).

Pendekatan etika dalam tata kelola BUMDes juga sejalan dengan prinsip good governance, yang menekankan tanggung jawab sosial, profesionalisme, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset desa (Yulianti & Pramono, 2023). Dengan demikian, kegiatan pendampingan BUMDes Raharja tidak hanya merepresentasikan implementasi kebijakan desa, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi nilai moral dan etika dalam praktik ekonomi lokal.

Dengan demikian, secara keilmuan, pendampingan BUMDes Raharja Desa Punjul mencerminkan integrasi antara teori dan praktik. Kegiatan ini menggabungkan aspek akademik dari berbagai disiplin ilmu manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan, dan pendidikan masyarakat ke dalam kegiatan nyata yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Pendampingan ini membuktikan bahwa penerapan teori-teori keilmuan dalam konteks lokal dapat menghasilkan perubahan yang signifikan, baik dari segi sistem tata kelola, perilaku organisasi, maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan ini menunjukkan relevansi antara teori tata kelola lembaga ekonomi desa dengan praktik lapangan. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes. Dari sisi akademis, kegiatan ini menjadi contoh penerapan konsep good governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekonomi lokal desa. Kegiatan ini juga memperlihatkan bagaimana pengetahuan manajemen keuangan yang diajarkan di perguruan tinggi dapat diterapkan secara kontekstual di masyarakat desa..

5. KESIMPULAN

Dari hasil pendampingan, diperoleh gambaran bahwa pengurus BUMDes Raharja memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan perbaikan tata kelola, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan pengetahuan teknis, minimnya fasilitas pencatatan, serta kebiasaan administratif yang belum tertata dengan baik. Melalui kegiatan ini, pengurus mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya sistem keuangan yang tertib, pembuatan laporan keuangan secara berkala, dan penggunaan format administrasi yang sesuai dengan ketentuan BUMDes.

Pendampingan juga menghasilkan perubahan positif dalam hal kesadaran pengurus terhadap pentingnya akuntabilitas publik. Para pengurus mulai menyadari bahwa setiap transaksi dan penggunaan dana BUMDes harus dicatat secara sistematis dan dilaporkan secara transparan kepada masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga membentuk nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam

pengelolaan lembaga ekonomi desa.

Selain aspek keuangan, kegiatan ini turut memperkuat tata kelola kelembagaan BUMDes melalui pembenahan struktur organisasi, pembagian tugas yang lebih jelas, serta perbaikan mekanisme komunikasi antarunit usaha. Pengurus juga difasilitasi untuk menyusun format laporan keuangan bulanan dan tahunan yang lebih rapi serta mudah dipahami. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan BUMDes Raharja dapat menjadi contoh bagi lembaga ekonomi desa lain dalam menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) di tingkat desa.

Secara umum, kegiatan pendampingan ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Pendampingan tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja yang disiplin, jujur, dan profesional di kalangan pengurus. Keterlibatan aktif pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Sinergi antara ketiga pihak ini diharapkan terus terjalin untuk menjaga keberlanjutan program dan memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya kegiatan *Pendampingan Penguatan Tata Kelola dan Administrasi Keuangan pada BUMDes Raharja*. Kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik berkat dukungan, kolaborasi, dan keterlibatan berbagai pihak. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Punjul yang telah memberikan izin, fasilitas, serta ruang koordinasi yang kondusif selama proses pendampingan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus BUMDes Raharja yang telah berpartisipasi aktif, terbuka dalam berbagi informasi, serta memiliki semangat tinggi dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan administrasi keuangan lembaga. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada masyarakat Desa Punjul serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusi moral, data, dan dukungan teknis sehingga kegiatan pendampingan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan kinerja BUMDes Raharja. Semoga upaya ini dapat menjadi langkah berkelanjutan menuju pengelolaan BUMDes yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2018). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (Pearson Education).
- Ayu, M., Azriya, N., Tri Windari, K., & Sang Bumi Ruwa Jurai, U. (2020). Tata kelola dan administrasi BUMDes. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 1(1).
- Firmansyah Amrie, A., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2023). Optimalisasi BUMDes di Indonesia melalui strategi digitalisasi, penguatan modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(1).
- Hartono, R. I., Yulisman, P., Fitrya Murni, R., Mahmud Yunus Lubuk Lintah, J., Kuranji, K., & Padang, K. (2025). Etika bisnis Islami dalam perspektif fiqih muamalah antara hukum, moral, dan spiritualitas. *Moral*, 2(2), 241–250. <https://doi.org/10.61132/moral.v2i2.995>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2021). *Keuangan publik Islam: Teori dan praktik*. Kencana.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendampingan Masyarakat Desa*. Kemdesa PDTT.
- Kunci, K., Transparansi, :, Akuntabilitas, :, & Bumdes, ; (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes (Studi Kasus BUMDes Sejahtera Cemani). *Artikel Abstrak*.
- Nurfitriasih, D. M., Widiastuti, R., Kamayanti, A., Sari, P. A., Hudiarini, S., & Kartiko, G. (2025). Pendampingan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan unit usaha BUMDes Pulotondo. *Journal of Community Development*, 6(1), 158–167. <https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1634>
- Samosir, W. M., Agani, W., Puteri, N. H., Ardiansyah, F., & Lorang, F. D. (2023). Tata kelola kolaboratif dalam pembangunan ekonomi lokal: Studi kasus BUMDes Guwosari Maju Sejahtera. *Politika*, 16(1), 2025. <https://doi.org/10.14710/politika.16.1.2026.31-51>
- Sidik, H. (2022). Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi pedesaan di Desa Langensari. *Kompasiana*, 4(1). <https://www.kompasiana.com/arakoo/5c5b>
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2020). *Decentralization and rural development in Indonesia*. Springer.
- Tarlani, T., Saraswati, S., Akliyyah, L. S., R, L. F., & Dananjaya, H. A. S. (2023). Indikator tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia dalam merespon era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(3). <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.41081>
- Trivena, O., Karinda, Y. P., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2023). Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Widiastuti, H., Manuhara Putra, W., Rahman Utami, E., & Suryanto, R. (2023). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(Oktober), 257–288.

Yulianti, R., & Pramono, S. E. (2023). Tata kelola badan usaha milik desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Desa*, 7(2), 85–98.
<https://doi.org/10.23969/japdes.v7i2.XXXX>